**ABSTRAK**

 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu program prioritas yang telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum. Di Kabupaten Bekasi pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan dapat dikatakan belum menyeluruh, terutama pada bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan. Hal ini didasari pada bidang Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kecamatan Tambun Utara yang baru dimulai pada tahun 2015. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan mengenai bagaimana pelaksanaan program PATEN ini sehingga Pengamat mengambil judul **“IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT”.**

Pengamatan ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga pengamat dapat memberikan kesimpulan mengenai bagaimana pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi serta hal apa yang perlu diperbaiki.

 Sejauh ini pelaksanaan Program PATEN di Kabupaten Bekasi sudah cukup baik terutama dalam bidang Pembuatan KTP-el. Namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah blangko KTP-el yang diterima Kecamatan serta adanya petugas pelaksana PATEN yang belum sepenuhnya memahami standar pelayanan untuk melaksanakan program PATEN di bidang Pembuatan KTP-el.

 Adapun saran yang pengamat berikan dalam pelaksanaan program PATEN dalam bidang Pembuatan KTP-el ini antara lain: membuat peraturan yang mengatur penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Bekasi serta membuat pengaturan mulai dari proses pendaftaran hingga pendistribusian KTP-el.

**Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Administrasi Terpadu, Administrasi Kependudukan, Pembuatan KTP-el**

***ABSTRACT***

 *Administration Service of Integrated District (PATEN) is one of the priority programs that has been included in the Strategic Plan the Ministry of Interior of 2010-2014 with the aim of enhancing United Fleets Weapons the relationship between local and central in the operation of the General. In Bekasi Regency, the delegation of authority from the Regent to the district can be said to be not comprehensive, especially in the sector of Population Administration Services. This is based on sector of Making Service Electronic Identity Card in North Tambun District which was only started in 2015. Therefore, it is necessary to observe how the implementation of this Integrated Administration Service District program so that observers take the title* ***“IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATION SERVICE OF INTEGRATED DISTRICT (PATEN) IN NORTH TAMBUN DISTRICT BEKASI REGENCY WEST JAVA PROVINCE”.***

 *This observation was conducted using qualitative descriptive method with inductive approach. Data collection techniques are done by observation, intervies, and documentation so that the observer can give conclusion about how the implementation, the obstacles faced and what things need to be improved.*

 *So far the implementation of PATEN program in Bekasi Regency is passable, especially in the sector of Making ID Card. However, in the implementation there are still obstacles faced namely the limited form of ID Card received by the District and the presence of PATEN implementing officers who have not fully understand the service standards to implement the PATEN program in the sector of Making ID Card.*

 *The suggertions that observers provide in the implementation PATEN program in the sector of Making ID Card are: to make regulations the implementation of PATEN in Bekasi Regency and make arrangements ranging from the registration process to the distribution of ID Card*

***Keywords: Implementation, Integrated Administration Service, Population Administration, Making ID Card***